



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
UNIT KERJA : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PP DAN PA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **DYAH RETNO SULISTYOWATI**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **894632**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **4.295.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 154 m2/100 m2 di KAB / KOTA WONOSOBO, HASIL SENDIRI Rp. 780.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 137 m2/137 m2 di KAB / KOTA WONOSOBO, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/110 m2 di KAB / KOTA WONOSOBO, WARISAN Rp. 340.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 172 m2/180 m2 di KAB / KOTA WONOSOBO, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 322 m2/200 m2 di KAB / KOTA WONOSOBO, HASIL SENDIRI Rp. 630.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 273 m2/80 m2 di KAB / KOTA WONOSOBO, HASIL SENDIRI Rp. 385.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/124 m2 di KAB / KOTA WONOSOBO, HASIL SENDIRI Rp. 660.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **474.500.000**

1. MOTOR, HONDA ATI1I21BO1A/T Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
2. MOBIL, PAJERO JEEP Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000



3. MOBIL, HONDA HR-V RU5 1.8 RS CVT CKD Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000
4. MOTOR, HONDA SUPRA Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 51.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 40.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 4.861.000.000

III. HUTANG Rp. 2.072.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.789.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.